

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025



**KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

RENCANA KERJA

**DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

**KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah ini akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Tasikmalaya untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2025.

Semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini mendapatkan ridha dari Allah SWT, dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah dirumuskan dalam Renja ini. Aamiin.

Singaparna, 11 Juli 2025

KEPALA DINAS SOSIAL PPKB P3A
KABUPATEN TASIKMALAYA



OPAN SOPIAN, S. Pd., M.Si., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671028 199103 1 008

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-6
1.3 Maksud dan Tujuan	I-15
1.4 Sistematika Penulisan	I-16
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...	II-69
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, PPKB, P3A	II-73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A	III-3
3.3 Program Dan Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, . PPKB P3A	III-1 IV-1

4.1 Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.	IV-1
4.2 Uraian Program dan Kegiatan	IV-5
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A dengan Perencanaan Pembangunan Daerah	I-4
Gambar 1.2	Tindak Lanjut Renja dalam Proses Penyusunan APBD	I-6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya	II-40
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya	II-70
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Dinas Sosial PPKB P3A	III-4
Tabel 3.2	Tujuan Dinas Sosial, PPKB, P3A	III-6
Tabel 3.3	Sasaran Dinas Sosial, PPKB, P3A	III-7
Tabel 3.4	IKU Dinas Sosial , PPKB, P3A	III-8
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan Dinas Sosial, PPKB, P3A	IV-1
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan	IV-7
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	IV-14

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (*selanjutnya disingkat menjadi Dinas Sosial PPKB P3A*) Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah baru yang dibentuk pada awal tahun perencananan setelah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021-2026.

Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial;
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 3) Urusan pilihan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. *Urusan pemerintahan wajib* adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan *urusan pemerintahan pilihan* adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah dan yang dimaksud dengan *pelayanan dasar* adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Rencana Kerja Dinas Sosial, PPKB, P3A yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial, PPKB, P3A untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Sosial, PPKB, P3A, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, PPKB, P3A dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berpedoman pada RPJMN 2020-2025, memperhatikan RPJMD Provinsi Jaa

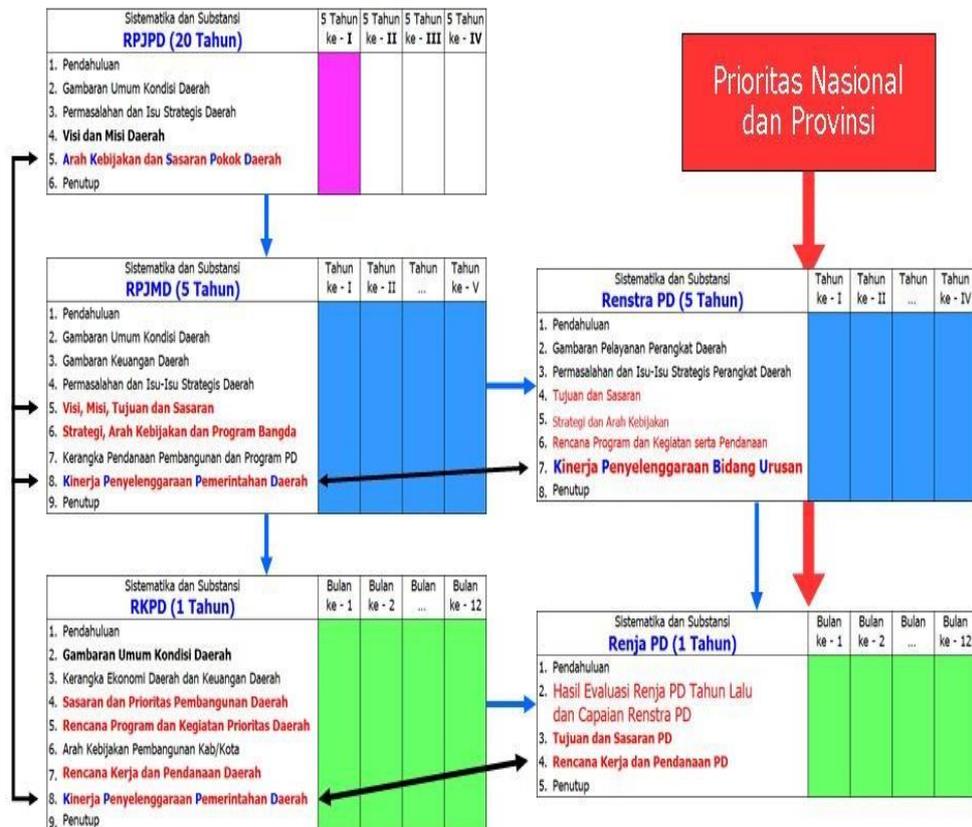
Barat Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025.

Proses penyusunan Renja dilakukan secara (online) melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menjadi babak baru bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

1. Renja OPD merupakan dokumen yang memuat kebijakan, rencana program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada tahun sebelumnya.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Dokumen Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Tahapan penyusunan Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A adalah sebagai berikut:

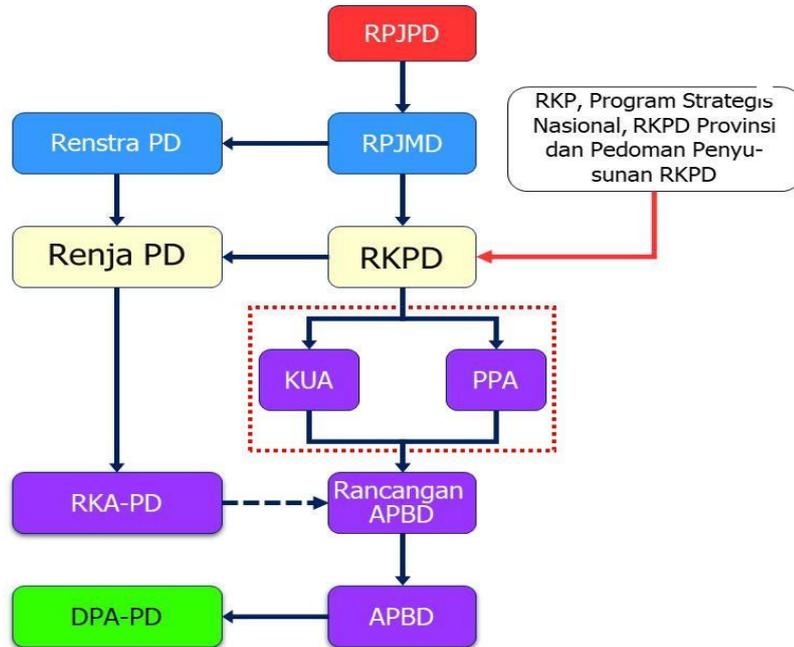
- 1) Persiapan penyusunan Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, PPKB, P3A, evaluasi hasil Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A tahun

berjalan;

- 3) Penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A dan Rancangan Awal RKPD;
- 4) Pembahasan Rancangan Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A dalam Forum Dinas Sosial, PPKB, P3A/lintas Dinas Sosial, PPKB, P3A untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A berdasarkan Perkada tentang RKPD;
- 6) Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tindak lanjut dokumen Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.2.
Tindak Lanjut Renja dalam Proses Penyusunan APBD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5235);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
 23. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
40. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2026;
44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
54. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
55. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Dinas Sosial, PPKB, P3A Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Dinas Sosial, PPKB, P3A Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Sosial, PPKB, P3A;
56. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
57. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 55);
58. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2025. Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

59. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0006 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial, PPKB, P3A dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan dan sebagai pedoman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, PPKB, P3A untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2) Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya dan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya serta RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2025;

- 3) Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
- 4) Instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan anak dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Sosial, PPKB, P3A tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, PPKB, P3A, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, PPKB, P3A, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Dinas Sosial, PPKB, P3A.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Dinas Sosial, PPKB, P3A untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

RENCANA KERJA

**DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS SOSIAL, PPKB, P3A
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023

KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun 2024

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial PPKB P3A Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial PPKB P3A Tahun 2023 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial PPKB P3A sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2025.

- 1) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.439.530.422,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 6.518.566.312,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 87,62%. Target kinerja program adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% dan telah terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 5 (Lima) kegiatan dan 16 (Lima Belas) Sub Kegiatan, yaitu :
 - (1) *Kegiatan* Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*) terealisasi

sebesar Rp. 90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00%. Output : *Cakupan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang akuntabel 30 (Tiga Puluh) Dokumen*, sedangkan Outcome : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;*

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00 % Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sedangkan Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00 % Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sedangkan Outcome : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*, pagu anggaran sebesar Rp. 5.737.750.422,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 4.938.817.348,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan*

Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 86,02%. Output : *Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%)*, sedangkan Outcome : *Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;*

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 5.737.750.422,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 4.938.817.348,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 86,02%. Output : *Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*, Sedangkan Outcome : *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.*

(3) *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*, pagu anggaran sebesar Rp. 626.410.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 600.687.388,00 (*Enam Ratus Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,89%. Output : *Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*, sedangkan Outcome : *Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;*

a. Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 199.900.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 175.966.000,00 (

Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 88,03%. Output : Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sedangkan Outcome : Tersedianya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Dinas..

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 72.584.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 71.707.888,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,79%. Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Sedangkan Outcome : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 39.900.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 39.802.500,00 (*Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,76% Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sedangkan Outcome : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 56.296.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 56.296.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00 % Output : Tersedianya Bahan/Material, Sedangkan Outcome : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan.
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 52.730.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 52.725.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,99% Output : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sedangkan Outcome : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 155.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 154.725.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,99,00%. Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sedangkan Outcome : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- g. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Pagu Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00%. Output : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Sedangkan Outcome : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- (4) *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, pagu anggaran sebesar Rp. 554.139.500,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 521.702.961,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,15 %. Output : Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (12 bln), sedangkan Outcome : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Dinas (100%);
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pagu Anggaran sebesar Rp. 210.039.500,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 191.477.961,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 91,16%.

Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sedangkan Outcome : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 324.100.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 310.225.000,00 (*Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,72%. Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sedangkan Outcome : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00 % Output : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sedangkan Outcome : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

(5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 431.230.500,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 370.358.615,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) dengan persentase

penyerapan anggaran sebesar 85,88%. Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, sedangkan Outcome : Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Aparatur (100%);

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 286.230.500,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 225.856.115,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 78,91 % Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sedangkan Outcome : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 24.960.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,84 % Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sedangkan Outcome : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 119.542.500,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,62%. Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Sedangkan Outcome : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

2) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, dari pagu anggaran sebesar Rp. 468.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 468.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00 %. Target kinerja program adalah Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi PPKS Skala (Penyandang Disabilitas, Anak, Lansia Terlantar dan gepeng) di Luar Panti Sesuai Perhitungan Kebutuhan Dalam 1 Tahun 100% dan telah terealisasi 100,00%. Program ini didukung oleh 1 (*Satu*) kegiatan dan 1 (*Satu*) Sub Kegiatan, yaitu :

(1) *Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota*, pagu anggaran sebesar Rp. 468.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 468.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00 %,

Output : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, sedangkan Outcome : Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS;

a. *Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota*, Pagu Anggaran sebesar Rp. 468.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 468.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00%. Output : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.103.000.000,00 (*Empat Milyar Seratus Tiga Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 4.027.949.660,00 (*Empat Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,17%. Target kinerja program adalah Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi PPKS Skala (Penyandang Disabilitas, Anak, Lansia Terlantar dan gepeng) Di Luar Panti Sesuai Perhitungan Kebutuhan Dalam 1 Tahun 100% dan telah terealisasi 98,17%. Program ini didukung oleh 1 (*Satu*) kegiatan dan 2 (*Dua*) Sub Kegiatan, yaitu :

(2) *Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*, pagu anggaran sebesar Rp. 4.103.000.000,00 (*Empat Milyar Seratus Tiga Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 3.994.589.660,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,17%, Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang di Jangkau (100%), sedangkan Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial pada Saat dan Setelah Masa Tanggap Darurat Bencana Daerah;

a. *Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan*, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.645.608.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 2.591.298.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,05 % Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Terpenuhi-nya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, Pagu Anggaran* Sebesar Rp. 1.423.642.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 1.403.291.660,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,84 % Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Terpenuhi-nya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.
- (3) *Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*, pagu anggaran sebesar Rp. 33.750.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 33.360.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,84%, Output : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, sedangkan Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- a. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan*, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 33.750.000,00 (*Tiga Puluh Tiga*

Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 33.360.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)* dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,84%. Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Layanan Rujukan, Sedangkan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

4) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.173.522.500,00 (*Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 3.494.827.400,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 87,47%. Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial dan terealisasi 87,47%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (*Dua*) Sub Kegiatan, yaitu :

(1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 4.173.522.500,00 (*Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 3.494.827.400,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 83,74%. Output : Terlaksananya Pengentasan Keluarga

Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota, sedangkan Outcome : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 212.500.000,00 (*Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 210.607.200,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,11%. Output : Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota, sedangkan Outcome : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 3.961.022.500,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 3.284.220.200,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 82,91 % Output : Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

5) PROGRAM PROGRAM PENANGANAN BENCANA, dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.599.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 1.554.450.025,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,21%. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Masa Tanggap Darurat dan terealisasi 49,47%. Program ini didukung oleh 2 (*Dua*) kegiatan dan 3 (*Tiga*) Sub Kegiatan, yaitu :

(1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 475.000.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 453.962.025,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,57%. Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan ber II na sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 475.000.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 453.962.025,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran

sebesar 95,57%. Output : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota.

(2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 1.124.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 1.100.488.000,00 (*Satu Milyar Seratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,91%. Output : Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang tersedia, sedangkan Outcome : Jumlah Pekerja Sosial Propesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia.*ang akuntabel 30 (Tiga Puluh) Dokumen;*

a. Sub Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 624.000.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 624.000.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00%. Output : Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Orang yang

Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.

- b. Sub Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 476.488.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,30%. Output : Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.

- (5) PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 653.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 65.2995.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00%. Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota dan terealisasi 100,00 %. Program ini didukung oleh 2 (Dua) kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan, yaitu :

- (1) Kegiatan Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 153.000.00,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 152.995.000,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00%. Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota, umlah Kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota, Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Terlaksananya pengarusutamaan gender di Kabupaten Tasikmalaya.
- a. Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 153.000.00,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 152.995.000,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00%. Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota.

- (2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100 % Output : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota, sedangkan Outcome : Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan;
- a. Sub Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100 %. Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan.
- (3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta*

Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%. Output : Meningkatnya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak, sedangkan Outcome : *Cakupan sumber daya manusia penanganan korban kekerasan terhadap perempuan* ;

- a. Sub Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100 % Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.

- (5) PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 325.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 32.4970.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 84,53%. Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dan terealisasi 99,99%.

Program ini didukung oleh 2 (*Dua*) kegiatan dan 2 (*Dua*) Sub Kegiatan, yaitu :

- (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 74.970.000,00 (*Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,96%. Output : Terealisasinya lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi, sedangkan Outcome : Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi ;
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 74.970.000,00 (*Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,96 %. Output : Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak dalam Daerah Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp.

250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100 %
Output : Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia, sedangkan Outcome : Jumlah Pusat Layanan Bagi Keluarga dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/ Kota yang disediakan ;

a. Sub Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100 %
Output : Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia.

(6) PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

(PHA), dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.610.300.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 1.564.307.500,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,14%. Cakupan Pemenuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha dan terealisasi 97,14%. Program ini didukung oleh 2 (*Dua*) kegiatan dan 4 (*Empat*) Sub Kegiatan, yaitu :

(1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pmeerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 148.820.000,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,21%. Output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Outcome : Jumlah pelembagaan Desa Layak Anak ;

a. Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 148.820.000,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan*

Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,21%. Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- (2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 1.460.300.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 1.415.487.500,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,93%. Output : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, sedangkan Outcome : Cakupan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak ;
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100 % Output :

Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 1.060.300.000,00 (*Satu Milyar Enam Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 1.015.487.500,00 (*Satu Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,77%. Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00 %

Output : Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Sedangkan Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

(7) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN dari pagu anggaran sebesar Rp. 375.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 36.8983.990,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,40%. Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate) 98,40%. Program ini didukung oleh 3 (*Tiga*) kegiatan dan 3 (*Tiga*) Sub Kegiatan, yaitu :

(1) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 93.750.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 92.500.000,00 (*Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,67%. Output : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat

Peningkatan Kapasitas, sedangkan Outcome Cakupan sumber daya manusia penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 93.750.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 92.500.000,00 (*Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,67%. Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, sedangkan Outcome Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- (2) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 217.500.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 216.778.390,00 (*Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh*

Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,67%. Output : Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi, sedangkan Outcome : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan;

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 217.500.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 216.778.390,00 (*Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,67%. Output : Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Outcome : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat.
- (3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran

sebesar Rp. 63.750.000,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 59.705.600,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,66%. Output : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, sedangkan Outcome : Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota;

c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 63.750.000,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 59.705.600,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,66%. Output : Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, sedangkan Outcome : Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.

(8) **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 168.600.000,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 166.635.848,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,84%. Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate) 98,84%. Program ini didukung oleh 1 (*Satu*) kegiatan dan 3 (*Tiga*) Sub Kegiatan, yaitu :

(1) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 168.600.000,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 166.635.848,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,84%. Output : Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sedangkan Outcome : Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampanye KB yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan ;

a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, pagu anggaran sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar

0,00%. Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, Sedangkan Outcome : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.

b. Sub Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga , pagu anggaran sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 0,00%. Output : Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, Sedangkan Outcome : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.

c. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, pagu anggaran sebesar Rp. 168.600.000,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 166.635.848,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupia*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,84%. Output : Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, Sedangkan Outcome : Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

(9) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

(KB), dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.719.823.000,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 9.948.607.288,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,81%. Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate) 92,81%. Program ini didukung oleh 4 (*Empat*) kegiatan dan 12 (*Dua Belas*) Sub Kegiatan, yaitu :

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, pagu anggaran sebesar Rp. 1.095.950.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 1.038.272.158,00 (*Satu Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,74%. Output : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, sedangkan Outcome : Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan

Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;

- a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 119.970.000,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,98%. Output : Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, sedangkan Outcome : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
- b. Sub Kegiatan Promosoi dan KIE Program KKBPK melalui Media Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 139.650.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,10%. Output : Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media

Luar Ruang, Sedangkan Outcome : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok), pagu anggaran sebesar Rp. 507.000.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 507.000.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00%. Output : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), Sedangkan Outcome Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, pagu anggaran sebesar Rp. 238.950.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima*

Puluh Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 214.902.158,00 (*Dua Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,94%. Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), Sedangkan Outcome : Tersedianya pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program KKBPK.

- e. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK, pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 56.750.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 70,94%. Output Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK, Sedangkan Outcome : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK.

- (2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), pagu anggaran sebesar Rp. 1.556.600.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 1.550.900.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,63%. Output : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan

Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, sedangkan Outcome : Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;

a. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 94.300.000,00 (*Embilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,30%. Output : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, sedangkan Outcome : Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;

b. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), pagu anggaran sebesar Rp. 1.456.600.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. .456.600.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00%. Output :

Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Sedangkan Outcome : Meningkatnya kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang menerima bantuan operasional.

- (3) Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 2.633.273.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Duaratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 1.928.135.130,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 73,22%.
Output : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, sedangkan Outcome : Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
- a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, pagu anggaran sebesar Rp. 37.800.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 8.160.000,00 (*Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar

21,59%. Output : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, terealisasinya pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, Sedangkan Outcome : Meningkatnya Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), pagu anggaran sebesar Rp. 2.573.573.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 1.902.575.130,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 73,93%. Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terealisasinya sosialisasi tentang MKJP pada PUS, Sedangkan Outcome : Meningkatnya Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

c. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, pagu anggaran sebesar Rp. 21.900.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 17.400.000,00 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus*

Ribu Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 79,45%. Output : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Sedangkan Outcome : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.

- (4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 5.434.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 5.431.300.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,95%. Output : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya), sedangkan Outcome : Jumlah Kelompok Kegiatan yang melakukan advokasi pelayanan dan pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga ;

- a. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 6.300.000,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 70,00%. Output : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB,

Sedangkan Outcome : Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPB di Kampung KB, pagu anggaran sebesar Rp. 5.425.000.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 5.425.000.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100,00%. Output : Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB, Sedangkan Outcome : Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB.

- (5) **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.101.458.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 10.701.666.902,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,40%.Program ini didukung oleh 1 (*Satu*) kegiatan dan 2 (*Dua*) Sub Kegiatan, yaitu :
- (1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, pagu anggaran sebesar Rp.

11.101.458.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 10.701.666.902,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,40%. Output : Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk, sedangkan Outcome : Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);

a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), pagu anggaran sebesar Rp. 2.045.058.000,00 (*Dua Milyar Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 1.647.666.902,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*) dengan

persentase penyerapan anggaran sebesar 80,57 %. Output : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Terlaksananya Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Terselenggaranya Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit / Stunting, Sedangkan Outcome : Tersedianya kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), pagu anggaran sebesar Rp. 9.056.400.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), terealisasi sebesar Rp. 9.056.400.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,97%. Output : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Sedangkan Outcome : Tersedianya kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PPKB P3A

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi kinerja Dinas Sosial PPKB P3A dan bagi Daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah juga terhadap capaian program seperti :

1. SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal.
3. sarana dan prasarana yang kurang memadai,
4. SDM Aparatur masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas
5. Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat belum memadai.
6. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
7. Menurunnya kebutuhan ber KB, Meningkatnya usia kawin pertama.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</i>	70,5	68,57	69,5	69,5	100	70	138	1,94		
				<i>Nilai IKM Perangkat Daerah</i>	80,5	86,55	79,5	87,11	109,572	80	174	2,14		
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang akuntabel	59	10	8	8	100	10	24	0,24	
1	06	01	2.01	01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27	4	4	4	100	6	12	0,67
1	06	01	2.01	06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4	0	0,00	
1	06	01	2.01	06	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	32	6	4	4	100	4	12	0,50

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	28,72	48	48	48	100	54	144	3,00
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28,72	48	48	48	100	48	144	3,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	5	1	1	1	100	1	2	0,04
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	0	1	1	100	1	1	0,08
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	1	1	100	1	13	0,22
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60	12	1	1	100	1	13	0,22
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60	12	1	1	100	1	13	0,22
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	1	1	100	1	13	0,22
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	1	1	100	1	13	0,22
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	1	1	100	0	0	0
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang dinas	5	1	1	1	100	1	2	0,40
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	1	1	100	1	13	0,22

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	1	1	100	0	0	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	1	1	100	1	13	0,22
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik da	5	1	1	1	100	1	2	0,40
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	465	93	23	23	100	97	139	2,32
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	12	40	40	100	15	52	0,87
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	1	1	1	100	1	2	0,40
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	3609	39	39	156	400	106	195	0,05
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS	3609	39	39	156	400	1120	195	0,05
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	156	39	39	156	400	1053	0	0,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota						39	234	1,50
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, lanjut usia terdiantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	500	10000,00%	10000,00%	100	100	100	244	0,49
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	25900	1100000,00%	1067500,00%	10675	100	3900	21.675	0,84
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	20050	1080000,00%	920000,00%	9200	100	10800	20.000	1,00
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1270	200	1475	1475	100	280	1.971	1,55
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS di Luar Panti Sosial yang menerima layanan data dan pengaduan, layanan rujukan, layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga	25900	1100000,00%	454400,00%	0	0	0	0	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	06	04	2.01	01	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20050	1080000,00%	454400,00%	0	0	0	0	0	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	67,4	1	67	67	100	67,17	77	1,14	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin dalam data terpadu yang difasilitasi untuk menerima bantuan sosial	4293645	1631317	390750	390750	100	1519896	2.022.067	0,47	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	4293645	858729	390550	390550	100	858729	1.249.279	0,29	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	5148732,858	1000	200	200	100	1400	1.200	0,00	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota						145	0	0,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100	100	100	100	100	100	100	267	2,67
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	15125	1445	1191	1191	100	1005	2.636	0,17	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	15125	1445	1191	1191	100	500	5.309	0,35
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	460	52	52	208	400	53	312	0,68
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4	0	3	3	100	1	3	0,75
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2964	52	52	208	400	52	312	0,11
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	500	2	2	2	100	3	4	0,50
2	08	02	01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Instansi Pemerintah yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG	100	1	1	1	100	1	2	0,04

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	02	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	320	1	1	1	100	1	2	0,04
2	08	02	01		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	545	60	1	1	100	1	61	0,11
2	08	02	01	02	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	545	60	1	1	100	1	61	0,11
2	08	02	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas dari Pemerintah Daerah	11	2	2	2	100	3	6	0,55
2	08	02	03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	600	2	64	64	100	50	213	0,36
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Layanan Bagi korban kekerasan perempuan	3	175	102	102	100	50	332	110,67
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	175	20	20	100	50	250	0,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	1	1	100	1	2	0,00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	270	20	20	100	50	345	345,00
2	08	03	2.02	02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	0	0	20	20	100	50	75	0,00
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sumber daya manusia penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	2	270	2	2	100	0	0	0
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2	270	2	2	100	0	0	0
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100	1	2	0,40
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	5	1	1	1	100	1	2	0,40

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	04	2.01	03	<i>Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	900	200	1	1	100	1	201	1,93
2	08	06	2.03		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga</i>						800	75	0,03
2	08	06	2.03	02	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>						3900	75	0,03
2	08	04	2.03		<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pusat Layanan Bagi Keluarga dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/ Kota yang disediakan</i>	112	1	25	25	100	39	37	0,33
2	08	04	2.03	01	<i>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>	112	1	25	25	100	39	37	0,33

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	439	1	2	2	100	112	3	0,01
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelebagaan Desa Layak Anak	45	1	1	1	100	36	2	0,01
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha						128	0	0,00
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	45	1	1	1	100	1	2	0,04
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak	0,91666667	1	1	1	100	76	2	0,01
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	64	125	125	100	320	239	0,75

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	06	2.02	02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	30	0	1	1	100	1	1	0,03
2	08	06	2.02	04	<i>Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	0	0	1	1	100	0	0	0
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	0,695	68	68,5	68,5	100	69	137	196,40
2	14	02	2.01		<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	<i>Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk</i>						1	0	0,00
						<i>Cakupan pelaksanaan pendidikan kependudukan (formal, non formal dan informal)</i>						10	0	0,00
2	14	02	2.01	02	<i>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota</i>						1	0	0,00

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan	0,4359	68	33,33	33,33	100	38,46	101	232,46
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						1	1	0,25
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	0	6	0	0	0	0	0
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	0	12	0	0	0	0	0
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4	0	1	1	100	0	1	0,25
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	72,2494558	71,18	71,53	71,53	100	72	143	1,98
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program KKBPK	231	54	56	56	100	59	110	0,48

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14	03	2.01	01	<i>Advokasi Program KKBPB Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	13	0	10	10	100	3	10	0,77
2	14	03	2.01	04	<i>Promosi dan KIE Program KKBPB Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang</i>	<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	54	10	1	1	100	15	11	0,20
2	14	03	2.01	06	<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPB melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	4	0	10	10	100	1	10	2,50
2	14	03	2.01	07	<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPB</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	4	12	9	9	100	1	21	5,25
2	14	03	2.01	08	<i>Pengendalian Program KKBPB</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPB</i>	0	0	2	2	100	0	0	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengendalian penduduk	8006	1814	39	39	100	2039	1.853	0,23
2	14	03	2.02	01	<i>Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	0	0	0	5	0	0	2.176	0,23
2	14	03	2.02	04	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	9605	1825	351	351	100	0	0	0
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesertaan ber-KB	164	0	8062	8062	100	0	8.062	49,16
2	14	03	2.03	01	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	205	41	41	41	100	41	82	0,40
2	14	03	2.03	03	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	32538,394 12	8071	8062	8062	100	8062	16.133	0,50

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	200	40	42	42	100	40	82	0,41
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kegiatan yang melakukan advokasi pelayanan dan pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	1836	360	365	330	90,411	375	690	0,38
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1836	360	1	0	0	0	0	0
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kegiatan yang melakukan advokasi pelayanan dan pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga						375	690	0,38
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	1836	0	351	300	85,47009	351	300	0,16

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21	0	21	63	300	21	63	3,00
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina	5825	1187	1187	1187	100	1327	2.374	0,41
2	14	04	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3985	797	797	797	100	797	1.594	0,40
2	14	04	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						1	0	0,00
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	156	39	39	39	100	39	556	3,56

2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perangkat daerah pengampu SPM (Standar Pelayanan Minimal), analisis kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja pelayanan SPM dan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya hingga tahun berjalan.

Capaian kinerja pelayanan SPM dan IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya hingga tahun berjalan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	SPM / Standar Nasional	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis	
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS	-	1	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	67,00							-	Penurunan capaian kinerja pada tahun 2020 dikarenakan kebijakan <i>refocusing</i> anggaran
		Teroenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	-	-	%	100,00	100,00	-		100,00			-	Target selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan

No	Indikator Sasaran	SPM / Standar Nasional	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana selama masa tanggap darurat bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	-
			3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	-
3	Terlayannya dan tertanganinya kasus PMKS oleh petugas terlatih	-	4	Persentase PPKS yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	-

No	Indikator Sasaran	SPM / Standar Nasional	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14
4	Terlayannya pengaduan kasus perempuan dan anak korban kekerasan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	-	5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	64,18	64,23	64,28	-	64,13	63,79	-	-	-
5	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap anak	-	6 Ratio Akseptor KB	%	71,18	71,53		-	71,90	-	-	-	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	-	7 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	skor	75,15	77,25		-	68,57	-	-	-	-

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional difokuskan pada telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.

Arah kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan dengan prioritas pembangunan adalah :

- 1) Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, melalui peningkatan keberfungsian sosial PPKS dan peningkatan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif;
- 2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional, melalui peningkatan partisipasi perorangan dan atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya sosial dan peningkatan profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Arah kebijakan pembangunan nasional yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatkan capaian Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG) dengan prioritas pembangunan utamanya adalah :

Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan;

- 1) Peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- 2) Peningkatan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia;
- 3) Peningkatan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak;
- 4) Peningkatan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak;
- 5) Peningkatan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan masyarakat serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Arah kebijakan pembangunan nasional yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang kemudian pada akhir tahun 2019 dikemas dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi *Bangga Kencana*, dengan prioritas pembangunan utamanya adalah:

- 1) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR);
- 3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan ber-KB;
- 4) Peningkatan pemakaian kontrasepsi;
- 5) Penguatan Kampung KB dan petugas lini lapangan;
- 6) Peningkatan Median Usia Kawin Pertama (MUKP);
- 7) Penguatan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, PPKB, P3A

Tujuan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- 2) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Sedangkan yang menjadi sasaran Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 ini adalah :

- 1) Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti;
- 4) Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS;
- 5) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak
- 6) Meningkatnya kepesertaan KB;
- 7) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Sosial PPKB P3A

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial
				Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
				Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
				Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Sosial PPKB P3A

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja PD Tahun 2025
1	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	68,08
2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,73
		Indikator Kabupaten Layak Anak	595
3	Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,37

Tabel 3.3**Sasaran Dinas Sosial PPKB P3A**

No	Sasaran PD	Indikator PD	Target Sasaran PD Tahun 2023
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	67,17
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100
3	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	4,24
4	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	100
5	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.32
6	Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	71,89
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,00

Tabel 3.4**IKU Dinas Sosial PPKB P3A**

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	67,17
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	100,00
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100,00
4	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	4,24
5	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.32
6	Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	71,89
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,00

RENCANA KERJA

**DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PPKB P3A

**KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL, PPKB, P3A

4.1 Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Pada Bab ini dapat dijelaskan Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, bahwa program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 yang mendukung pada IKU seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/ Kegiatan Dinas Sosial PPKB P3A

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

No	Sasaran	Program	Kegiatan
	usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
4	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Program	Kegiatan
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Program	Kegiatan
6	Meningkatnya Kepesertaan KB	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

No	Sasaran	Program	Kegiatan
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.2 Uraian Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pemetaan program/kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Hasil pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 khususnya pemetaan program/kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan wajib Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 adalah sebanyak 13 (*Tiga Belas*) program dan 31 (*Tiga Puluh Satu*) kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan strategis ini adalah sebesar Rp. 50.126.708.717,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah*). Rincian rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PaguIndikatif (Rp)	Ket.
1	2	4	5	6
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.513.868.017,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24.513.868.017,00	
1	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.631.868.017,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.756.868.017,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.716.868.017,00	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000,00	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000,00	

1	2	4	5	6
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.040.000.000,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	
		Penyediaan Bahan/Material	200.000.000,00	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	65.000.000,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000.000,00	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	
		Pengadaan Mebel	150.000.000,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400.000.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000,00	

1	2	4	5	6
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	
2	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.690.000.000,00	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.690.000.000,00	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000,00	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	650.000.000,00	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000,00	
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	100.000.000,00	
3	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.460.000.000,00	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.510.000.000,00	
		Penyediaan Permakanan	2.210.000.000,00	
		Penyediaan Sandang	1.050.000.000,00	
		Penyediaan Alat Bantu	80.000.000,00	

1	2	4	5	6
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	70.000.000,00	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	950.000.000,00	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.000.000,00	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	200.000.000,00	
		Penyediaan Permakanan	175.000.000,00	
		Penyediaan Sandang	75.000.000,00	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	100.000.000,00	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	150.000.000,00	
		Pemberian Layanan Rujukan	150.000.000,00	
4	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.412.000.000,00	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.412.000.000,00	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.900.000.000,00	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.082.000.000,00	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	200.000.000,00	

1	2	4	5	6
5	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.240.000.000,00	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.410.000.000,00	
		Penyediaan Makanan	600.000.000,00	
		Penyediaan Sandang	490.000.000,00	
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	320.000.000,00	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	830.000.000,00	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	80.000.000,00	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	750.000.000,00	
6	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	80.000.000,00	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	80.000.000,00	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	80.000.000,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.612.840.700,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.815.000.000,00	
7	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.370.000.000,00	
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	550.000.000,00	

1	2	4	5	6
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	250.000.000,00	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	650.000.000,00	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	650.000.000,00	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	
8	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	370.000.000,00	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000,00	

1	2	4	5	6
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	
9	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.625.000.000,00	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	725.000.000,00	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	450.000.000,00	
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	275.000.000,00	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000,00	
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	

1	2	4	5	6
10	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.450.000.000,00	
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000,00	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000,00	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.700.000.000,00	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	800.000.000,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	

1	2	4	5	6
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.797.840.700,00	
11	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.352.500.000,00	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	541.000.000,00	
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	270.500.000,00	
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	270.500.000,00	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	811.500.000,00	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	270.500.000,00	
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	270.500.000,00	
		Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	270.500.000,00	

1	2	4	5	6
12	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	15.752.975.000,00	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.771.750.000,00	
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	800.000.000,00	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	270.500.000,00	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	270.500.000,00	
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	270.500.000,00	
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	160.250.000,00	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.279.975.000,00	
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	479.975.000,00	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.800.000.000,00	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	7.343.750.000,00	

1	2	4	5	6
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	325.625.000,00	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.357.500.000,00	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.365.250.000,00	
		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	213.375.000,00	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	325.625.000,00	
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	270.500.000,00	
		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	325.625.000,00	
		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	160.250.000,00	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.357.500.000,00	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	3.357.500.000,00	

1	2	4	5	6
13	Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.692.365.700,00	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.421.865.700,00	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	215.375.000,00	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	820.096.250,00	
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	270.500.000,00	
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	805.644.450,00	
		Sosialisasi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	160.250.000,00	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	150.000.000,00	

1	2	4	5	6
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	270.500.000,00	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	270.500.000,00	
TOTAL :			50.126.708.717,00	

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	URUSAN	KINERJA URUSAN				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						50.126.708.717,00					52.835.718.017,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.513.868.017,00					25.838.618.017,00		
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						24.513.868.017,00					25.838.618.017,00		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.631.868.017,00					11.206.618.017,00		
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						190.000.000,00				265.000.000,00		
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang akun-tabel	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Poin 80 Poin	6 Dokumen	10 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Doku-men Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	155.000.000,00
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
					Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rea-lisasi Kinerja SKPD dan Lapo-ran Hasil Koordi-nasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reali-sasi Kinerja SKPD	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang akuntabel	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Poin 80 Poin	4 Laporan	10 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rea-lisasi Kinerja SKPD dan Lapo-ran Hasil Koordi-nasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	55.000.000,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
					Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang akurat	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Poin 80 Poin	4 Laporan	10 Dokumen		30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	55.000.000,00
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	48 Orang/bulan	54 Dokumen		7.716.868.017,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.791.618.017,00
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
					Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	3 Dokumen	54 Dokumen		20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	45.000.000,00
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
					Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	3 Dokumen	54 Dokumen		20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	45.000.000,00
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	1 Paket	1 Tahun		35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00
												7.756.868.017,00				7.881.618.017,00		
												1.040.000.000,00				1.215.000.000,00		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM Perang-kat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	1 Paket	1 Tahun	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai IKM Perang-kat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	1 Paket	1 Tahun	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	175.000.000,00
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai IKM Perang-kat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	1 Dokumen	1 Tahun	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	65.000.000,00
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Nilai IKM Perang-kat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	1 Paket	1 Tahun	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai IKM Perang-kat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	1 Laporan	1 Tahun	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	90.000.000,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
					Nilai IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	1 Laporan	1 Tahun	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	375.000.000,00			
1	06	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														450.000.000,00			525.000.000,00
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
					Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah penyediaan Barang Milik Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Poin 80 Poin	5 Unit	00 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	225.000.000,00			
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
					Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah penyediaan Barang Milik Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Poin 80 Poin	30 Unit	00 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	175.000.000,00			
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
					Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah penyediaan Barang Milik Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Poin 80 Poin	28 Unit	00 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	125.000.000,00			
1	06	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														600.000.000,00			650.000.000,00
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
					Nilai IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang dinas	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	1 Laporan	1 Tahun	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	225.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Nilai IKM Perang-kat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan penye-diaan jasa penun-jang dinas	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Poin 70 Poin	1 Laporan	1 Tahun	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	425.000.000,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					595.000.000,00					670.000.000,00	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
					Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Poin 80 Poin	97 Unit	1 Tahun	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan di-bayarkan Pajak-nya	97 Unit	425.000.000,00
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Poin 80 Poin	15 Unit	1 Tahun	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	70.000.000,00
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
					Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Poin 80 Poin	1 Unit	1 Tahun	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	175.000.000,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.690.000.000,00					1.815.000.000,00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					1.690.000.000,00					1.815.000.000,00	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan ka-pasitas	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106 Orang	1053 Orang	1120 Dokumen	750.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	1053 Orang	775.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106 Orang	39 Orang	1120 Dokumen	650.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Orang	675.000.000,00
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106 Orang	6 Keluarga	1120 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Keluarga	125.000.000,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106 Orang	14 Lembaga	1120 Dokumen	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	115.000.000,00
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)											
					Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106 Orang	8 Sertifikat	1120 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Sertifikat	125.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					4.060.000.000,00					4.835.000.000,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					3.510.000.000,00					3.635.000.000,00	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanaan											
					Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah Orang yang Mendapat-kan Pemenuhan Kebutuhan Per-makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyan-dang disabilitas terlantar, anak lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10800 Orang	3900 Orang	2.210.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pe-menuhan Kebu-tuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10800 Orang	2.235.000.000,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang											
					Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyan-dang disabilitas ter-lantar, dan ge-landangan penge-mis yang terpenuhi kebutuhan dasar-nya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Ke-lengkapan Lain-nya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewena-ngan Kabupaten/ Kota	Jumlah penyan-dang disabilitas terlantar, anak lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2000 Orang	3900 Orang	1.050.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewena-ngan Kabupaten/ Kota	2000 Orang	1.075.000.000,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	280 Orang	3900 Orang	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	105.000.000,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang	3900 Orang	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	95.000.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang	3900 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	125.000.000,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								950.000.000,00					1.200.000.000,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																
					Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS di Luar Panti Sosial yang menerima layanan data dan pengaduan, layanan rujukan, layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12000 Orang	4426 Orang		100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12000 Orang	125.000.000,00			
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																
					Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS di Luar Panti Sosial yang menerima layanan data dan pengaduan, layanan rujukan, layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1500 Orang	4426 Orang		200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	225.000.000,00			
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Perumahan																
					Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS di Luar Panti Sosial yang menerima layanan data dan pengaduan, layanan rujukan, layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	4426 Orang		175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000,00			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS di Luar Panti Sosial yang menerima layanan data dan pengaduan, layanan rujukan, layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	4426 Orang	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	4426 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Orang	150.000.000,00
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4172 Orang		150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4172 Orang	200.000.000,00
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		302 Orang		150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	302 Orang	200.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					5.412.000.000,00					5.512.000.000,00	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					5.412.000.000,00					5.512.000.000,00	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
					Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang mene-rima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah masya-rakat miskin dan rentan miskin dalam data terpadu yang difasilitasi untuk menerima bantuan sosial	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.17 %	626640 Orang	1519896 orang	1.900.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	659622 Orang	1.925.000.000,00
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
					Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang mene-rima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah masya-rakat miskin dan rentan miskin dalam data terpadu yang difasilitasi untuk menerima bantuan sosial	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.17 %	858729 Keluarga	1519896 orang	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Penge-n-tasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	858729 Keluarga	225.000.000,00
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											
					Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang me-nerima bantuan so-sial untuk perlin-dungan dan jami-nan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfa-at (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah masya-rakat miskin dan rentan miskin dalam data terpadu yang difasilitasi untuk menerima bantuan sosial	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.17 %	1600 Keluarga	1519896 orang	3.082.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Keluarga Pene-rima Manfaat (KPM) yang Men-dapatkan Bantuan Sosial Kesejah-teraan Keluarga Ke-wenangan Kabu-paten/Kota	1600 Keluarga	3.107.000.000,00
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat											
					Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang me-nerima bantuan so-sial untuk perlin-dungan dan jami-nan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengem-bangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masya-rakat miskin dan rentan miskin dalam data terpadu yang difasilitasi untuk menerima bantuan sosial	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.17 %	195 Orang	1519896 orang	230.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang Men-dapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewe-nangan Kabupaten/ Kota	195 Orang	255.000.000,00

1	06	06			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA										2.240.000.000,00				2.365.000.000,00	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										1.410.000.000,00					1.485.000.000,00
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan															
					Cakupan penangan-an korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Jumlah Orang yang Mendapat-kan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabu-paten/ Kota	Jumlah korban bencana yang menerima ban-tuan sosial pada saat dan setelah tang-gap darurat ben-cana daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	500 Orang	1005 Orang		600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Orang yang Mendapatkan Per-makanan 3x1 Hari dalam Masa Tang-gap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabu-paten/ Kota	500 Orang	625.000.000,00	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang															
					Cakupan penanga-nan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tang-gap darurat bencana daerah	Jumlah Orang yang Mendapat-kan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Ben-cana Kewena-ngan Kabu-paten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantu-an sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	500 Orang	1005 Orang		490.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pa-kaian dan Keleng-kapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabu-paten/Kota	500 Orang	515.000.000,00	
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi															
					Cakupan penanga-nan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tang-gap darurat bencana daerah	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabu-paten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima ban-tuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	1005 Orang		320.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Tempat Pe-ngungsian Kewe-nangan Kabu-paten/Kota	5 Unit	345.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					830.000.000,00					880.000.000,00	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana											
					Cakupan penangan-an korban bencana alam dan bencana sosial pa-da saat dan setelah masa tanggap da-rurat bencana da-erah	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koor-dinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejah-tereraan sosial dan / atau relawan so-sial yang tersedia	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Kampung	53 Orang	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kampung yang Melaksana-kan Koordina-si, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabu-paten/ Kota	4 Kampung	105.000.000,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					80.000.000,00					105.000.000,00	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					80.000.000,00					105.000.000,00	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
					Cakupan penge-lolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	Jumlah Makam yang Terpenuhi Peme-liharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 tahun	1 Makam	1 MP	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	105.000.000,00
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana											
					Cakupan penanga-nan korban bencana alam dan bencana sosial pa-da saat dan setelah masa tanggap da-rurat bencana da-erah	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koor-dinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejah-tereraan sosial dan / atau relawan so-sial yang tersedia	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %		53 Orang	750.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Melaksana-kan Koor-dinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabu-paten/ Kota	52 Orang	775.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2									25.612.840.700,00					26.997.100.000,00	
2	08								5.815.000.000,00					6.215.000.000,00	
2	08	02							1.370.000.000,00					1.470.000.000,00	
2	08	02	2.01						550.000.000,00					600.000.000,00	
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarus-tamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	325.000.000,00
					Cakupan kegiatan responsif gender pada pe-rangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/ Kota Caku-pan pe-rangkat daerah dan lembaga swasta yang mengikuti sosia-lisasi pelaksa-naan PUG melalui PPRG kewen-an-gan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pe-ngarustamaan Gender (PUG) Ke-wenangan Kabu-paten/Kota	Jumlah Instansi Pemerintah yang mengikuti koor-dinasi dan sinkro-nisasi pelaksa-naan PUG	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG					250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Me-ngikuti Sosialisasi Kebijakan Pelak-sanaan Penga-rustamaan Gen-der (PUG) Terma-suk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewe-nangan Kabu-paten/Kota	20 Orang	275.000.000,00
					Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/ Kota Cakupan pe-rangkat daerah dan lembaga swasta yang mengikuti so-sialisasi pelaksa-naan PUG melalui PPRG kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang me-ngikuti Sosialisasi Kebijakan Pelak-sanaan Penga-rustamaan Gen-der (PUG) Terma-suk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewe-nangan Kabu-paten/Kota	Jumlah Instansi Pemerintah yang mengikuti koor-dinasi dan sinkro-nisasi pelaksa-naan PUG	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 1 Dokumen	20 Orang	1 Dokumen				

2	08	02	2.02		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
														650.000.000,00					675.000.000,00	
2	08	02	2.02	0001	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi															
					Cakupan perangkat daerah dan lembaga swas-ta yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG melalui PPRG kewenangan Kabupaten/ Kota Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/ Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergeser dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen	160 Dokumen			650.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	675.000.000,00	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										170.000.000,00					195.000.000,00
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
					Cakupan perangkat daerah dan lembaga swas-ta yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG melalui PPRG kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas dari Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen 2 Dokumen	150 Orang	3 Lembaga			170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		195.000.000,00	

2	08	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	08	03										370.000.000,00					420.000.000,00				
2	08	03	2.02		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														200.000.000,00		
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota														225.000.000,00		
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																
					Cakupan Layanan Bagi korban kekerasan perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50 Orang	50 Orang		200.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	225.000.000,00			
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														170.000.000,00		
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																
					Cakupan Layanan Bagi korban kekerasan perempuan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Cakupan sumber daya manusia penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	52 Orang	52 Lembaga		170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	52 Orang	195.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.625.000.000,00					1.725.000.000,00	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					725.000.000,00					775.000.000,00	
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20 Perangkat Daerah	1 Dokumen	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	475.000.000,00
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					550.000.000,00					575.000.000,00	
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
					Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3900 Orang	800 Orang	550.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3900 Orang	575.000.000,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							350.000.000,00						375.000.000,00
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
					Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Pusat Layanan Bagi Keluarga dalam Meningkatkan Kese-taraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/ Kota yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	39 Layanan	39 layanan	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kese-taraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	39 Layanan	375.000.000,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							2.450.000.000,00					2.600.000.000,00	
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							750.000.000,00					800.000.000,00	
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
					Cakupan Peme-nuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah pelem-bagaan Desa La-yak Anak	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Dokumen	128 Organisasi	36 Dokumen	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pe-merintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pen-dampingan Peme-nuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerin-tah, Non Pemerin-tah, Media dan Dunia Usaha	128 Organisasi	425.000.000,00
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
					Cakupan Peme-nuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Ha-sil Koordinasi dan Sin-kronisasi Pelemba-gaan Pemenuhan Hak Anak Kewena-ngan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelemba-gaan Desa Layak Anak	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Dokumen	1 Dokumen	36 Dokumen	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Dokumen Ha-sil Koordinasi dan Sin-kronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	375.000.000,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								1.700.000.000,00						1.800.000.000,00		
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																
					Cakupan Pemenuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Anak yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Dokumen	320 Orang	76 %		800.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	320 Orang	825.000.000,00			
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
					Cakupan Pemenuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Dokumen	1 Dokumen	76 %		250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	275.000.000,00			
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
					Cakupan Pemenuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Dokumen	1 Dokumen	76 %		300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	325.000.000,00			
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
					Cakupan Pemenuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Dokumen	1 Dokumen	76 %		350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	375.000.000,00			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									19.797.840.700,00				20.782.100.000,00	
2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									1.352.500.000,00				1.477.500.000,00	
2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									441.000.000,00				541.000.000,00	
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota													
					Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	Jumlah Dokumen Peman-faan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan pendidikan kependudukan (formal, non formal dan infor-mal) Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69 %	1 Dokumen	10 Lembaga 1 Perda	270.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Peman-faan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	295.500.000,00
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													
					Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapat-kan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Cakupan pelaksanaan pendidikan kependudukan (formal, non formal dan infor-mal) Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69 %	10 Satuan Pendidikan	10 Lembaga 1 Perda	270.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah Satuan Pendidikan yang Men-dapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasi-litasi Pelaksanaan Pendidikan Kependu-dukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non formal dan Informal	10 Satuan Pendidikan	295.500.000,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								811.500.000,00					886.500.000,00
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
					Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	Jumlah Dokumen Pe-ngolahan dan Pelapo-ran Data Pengendalian Lapangan dan Pelaya-nan KB	Cakupan Rumah Data Kependu-dukan di Kam-pung KB yang dimanfaatkan un-tuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69 %	1 Dokumen	38,46 %	270.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Pe-ngolahan dan Pela-poran Data Penge-n-dalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	295.500.000,00	
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain													
					Prosentase Pema-kaian Kontrasepsi (CPR)	Jumlah Rumah Data Kependu-dukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memper-kuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pem-bangunan Ke-luarga, Kependu-dudukan, dan Ke-luarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Cakupan Rumah Data Kependu-dukan di Kampung KB yang diman-faatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pem-bangunan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69 %	6 Unit	38,46 %	270.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Mempe-rkuat Integrasi Prog-ram Bangsa Kenca-na (Pembangunan Ke-luarga, Kependu-dukan, dan Keluarga Berencana) di Sek-tor Lain yang dibentuk	6 Unit	295.500.000,00	
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													
					Prosentase Pema-kaian Kontrasepsi (CPR)	Jumlah Dokumen Profil Kependu-dukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Cakupan Rumah Data Kependu-dukan di Kam-pung KB yang dimanfaatkan un-tuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69 %	1 Dokumen	38,46 %	270.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Profil Kependu-dukan, Keluarga Be-rencana dan Pem-bangunan Keluarga	1 Dokumen	295.500.000,00	

2	14	03			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									15.752.975.000,00					16.284.600.000,00	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal									1.771.750.000,00						1.886.750.000,00
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana															
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Unit Sara-na Penyediaan dan Pendistri-busian KIE Prog-ram Bangsa Ken-cana (Pemba-ngunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Be-rencana)	Jumlah stake-older/ pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program KKBPK	Kab. Tasikmalaya , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	39 Unit	59 Dokumen		800.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusia n KIE Prog-ram Bangsa Kencana (Pemba-ngunan Kelu-arga, Kependudukan , dan Keluarga Beren-cana)	39 Unit	825.000.000,00	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana															
					Jumlah Pemakaian Kon-trasepsi Modern/mC PR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Opera-sional dan Sarana di Balai Penyuluhan Ban-gga Kencana (Pemba-ngunan Keluarga, Ke-pendudukan, dan Ke-luarga Berencana)	Jumlah stakehol-der/ pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program KKBPK	Kab. Tasikmalaya , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	1 Laporan	59 Dokumen		270.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	295.500.000,00	

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)												
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program KKBPK	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	1 Laporan	59 Dokumen	270.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mini-lok)	1 Laporan	295.500.000,00
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang												
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program KKBPK	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	15 Dokumen	59 Dokumen	270.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	15 Dokumen	295.500.000,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Organisasi yang Mendapat-kan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakehol-der/ pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam prog-ram KKBPBPK	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	3 Organisasi	59 Dokumen		160.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Organisasi yang Men-dapatkan Advo-kasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepen-dudukan, dan Ke-luarga Beren-cana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi	185.250.000,00	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							3.279.975.000,00						3.329.975.000,00	
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB yang Tersedia	Jumlah PKB/ PLKB yang dida-yagunakan Pe-rangkat Daerah KB untuk peren-canaan dan pe-laksanaan pem-bangunan di bi-dang pengem-dalian penduduk	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	39 Unit	2039 Dokumen		479.975.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Sarana Pendukung Ope-rasional PKB/ PLKB yang Tersedia	39 Unit	504.975.000,00	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
					Jumlah Pemakaian Kon-trasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penge-rakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PKB/PLKB yang didayagu-nakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengem-dalian penduduk	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	0 Orang	2039 Dokumen		2.800.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Kader yang Mengikuti Penge-rakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0 Orang	2.825.000.000,00	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							7.454.000.000,00						7.557.875.000,00
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kesertaan ber KB	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	41 Laporan	- orang	325.625.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	41 Laporan	350.625.000,00	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah kesertaan ber KB	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	8062 Orang	- orang	3.357.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8062 Orang	3.382.500.000,00	
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah kesertaan ber KB	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	40 Unit	- orang	2.365.250.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	40 Unit	2.390.250.000,00	
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB													
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah kesertaan ber KB	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	351 Orang	- orang	213.375.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	351 Orang	238.375.000,00	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya														
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah kesertaan ber KB	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	40 Laporan	- orang		325.625.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	40 Laporan	350.625.000,00	
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah kesertaan ber KB	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	351 Laporan	- orang		370.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	351 Laporan	295.500.000,00	
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah kesertaan ber KB	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	40 Orang	- orang		225.625.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	40 Orang	350.000.000,00	
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Pre-valency Rate)	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah kesertaan ber KB	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	351 Orang	- orang		160.250.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	351 Orang	200.000.000,00	

2	14	03	2.04		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2	14	03	2.04	0006	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembiayaan Kesertaan Ber-KB									3.357.500.000,00					3.500.000.000,00				
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
					Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/ mCPR (Metoda Contaceptive Pre-valency Rate)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengeolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kelompok Kegiatan yang melakukan advokasi pelayanan dan pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	351 Kampung	375 Kelompok	3.357.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	351 Kampung	3.500.000.000,00							
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									2.692.365.700,00					3.020.000.000,00				
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														2.421.865.700,00				2.720.000.000,00
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjut usiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 umur	1 Laporan	1327 Orang	215.375.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjut usiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	250.000.000,00							

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 umur	797 Unit	1327 Orang		820.096.250,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	797 Unit	850.000.000,00			
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 umur	1 Orang	1327 Orang		270.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1 Orang	320.000.000,00			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 umur	450 Laporan	1327 Orang	805.644.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	450 Laporan	900.000.000,00					
2	14	04	2.01	0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																	
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 umur	39 Orang	1327 Orang	160.250.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	39 Orang	200.000.000,00					
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 umur	39 Kelompok	1327 Orang	150.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	39 Kelompok	200.000.000,00					

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							270.500.000,00						300.000.000,00
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader ketahanan/ kesejahteraan keluarga yang di-bina	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 umur	3 Organisasi	39 Orang	270.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Organisasi			300.000.000,00
TOTAL												50.126.708.717,00					52.835.718.017,00	

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

BAB V PENUTUP

KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program, kegiatan dan subkegiatan, indikator, target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak semata mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kabupaten Tasikmalaya secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian, dokumen Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kabupaten Tasikmalaya yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.